



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RESTU
2. Jabatan : WAKIL REKTOR I (BIDANG AKADEMIK)
3. NHK : 76240

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.525.820.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/195 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/160 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, WARISAN Rp. 440.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 694 m2/80 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 59.820.000
5. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
6. Tanah Seluas 7700 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 4900 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 462 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 118.040.000**

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 40.000



2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.255.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 950.019.176

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.680.134.176

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.680.134.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.